

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Akhmad Aflaha,¹ Deden Purbaya,² Dedeng Juheri³, Ujang Cepi Barlian⁴

ABSTRACT

Funding is an important part of the management of educational institutions in achieving educational goals. Education financing can be formulated into four steps, namely; education financing concept, education financing model, education financing formulation, and education financing measurement.

The objective of standardizing financing through the concept of education financing is to determine the budgeting mechanism; The financing model is an effort to divide financing through two sides, namely the allocation side and the income side; The formulation of education financing is an effort to divide the financing model through the source model of the proof or acceptance letter model, the student weight planning model, the model based on experience, the model based on wisdom and Measurement of education financing is carried out in order to assess management performance with fairness of financing.

The results of the analysis of education financing standards can be concluded: First, the concept of education financing, which is a determining element in the budgeting mechanism. The determination of costs will affect the level of efficiency and effectiveness of activities in an organization to achieve its goals. Second, the education financing model. In principle, the education financing model has two sides, namely the allocation side and the income side. Third, the formulation of education financing is different from one another, namely; a) source model; b) proof letter model; c) student weight planning model; d) a model based on experience; e) proposed model and; e) wisdom model. Fourth, measuring education financing through reasonableness and policies.

Keywords: Analysis, Financing Standards, Education.

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat dirumuskan ke dalam empat langkah, yakni; konsep pembiayaan pendidikan, model pembiayaan pendidikan, formulasi pembiayaan pendidikan, dan pengukuran pembiayaan pendidikan.

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Dosen STAIMA Cirebon.

² Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Dosen STAIMA Cirebon.

³ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara.

⁴ Dosen Sekolah Pascasarjana UNINUS Bandung.

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Tujuan dari standarisasi pembiayaan melalui konsep pembiayaan pendidikan adalah menentukan mekanisme penganggaran; Model pembiayaan sebagai upaya membagi pembiayaan melalui dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan; Formulasi pembiayaan pendidikan sebagai upaya pembagian model pembiayaan melalui model sumber pembiayaan model surat bukti atau penerimaan, model rencana bobot siswa, model berdasarkan pengalaman model usulan, model berdasarkan kebijaksanaan dan; Pengukuran pembiayaan pendidikan dilakukan dalam rangka menilai kinerja manajemen dengan kewajaran pebiayaan.

Hasil analisis standar pembiayaan pendidikan dapat disimpulkan: *Pertama*, konsep Pembiayaan pendidikan, yaitu suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. *Kedua*, model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. *Ketiga*, formulasi pembiayaan pendidikan berbeda satu sama lainnya, yakni; a) model sumber; b) model surat bukti; c) model rencana bobot siswa; d) model berdasarkan pengalaman; e) model usulan dan; e) model kebijaksanaan. *Keempat*, pengukuran pembiayaan pendidikan melalui kewajaran dan kebijakan.

Kata kunci: *Analisis, Stándar Pembiayaan, Pendidikan.*

A. Pendahuluan

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya di tentukan oleh sumber daya manusia saja, melaikan juga di tentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata malainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orangtua dan masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi.

Dalam prosesnya hampir dapat dipastikan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen

pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini. Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan a) definisi produksi pendidikan, b) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan c) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum. Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, dan aktivitas dan kegiatan dalam institusi. Selain itu pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari menganalisis biaya pendidikan yaitu untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah/cara dalam pembuatan kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN, dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan ini berguna sebagai dasar atau pijakan dalam melakukan "investasi" di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat pendidikan hanya menghabiskan uang tanpa ada jaminan/prospek peningkatan hidup yang jelas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan permasalahan, "Bagaimana analisis pembiayaan pendidikan?" Dari permasalahan ini penulis menulis makalah ini dengan judul, "*Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan.*"

B. Pembahasan

1. Rumusan

Analisis standar pembiayaan pendidikan mencakup beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, konsep pembiayaan pendidikan, yaitu suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi

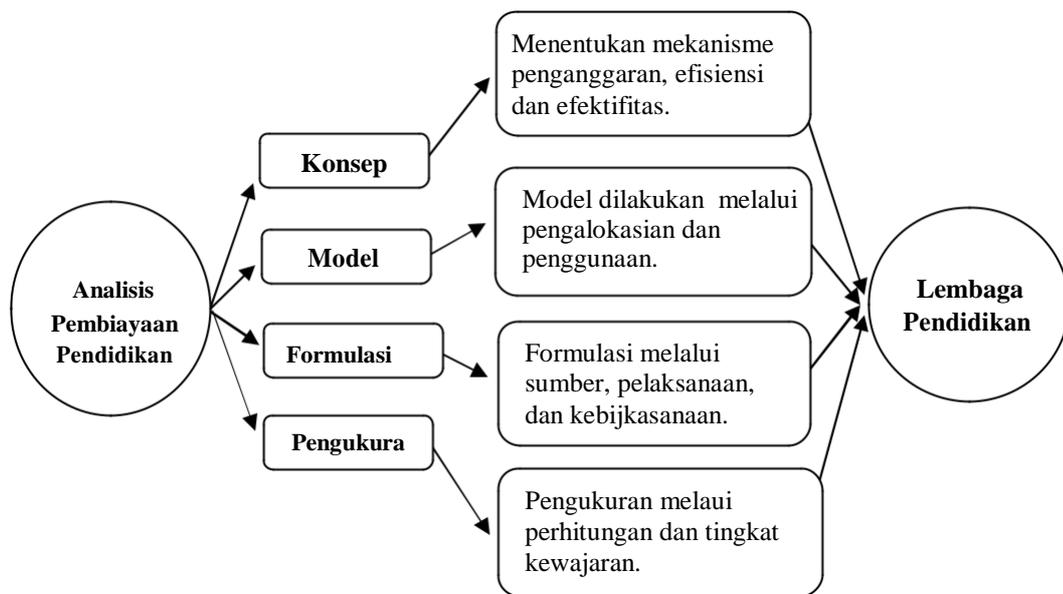
mencapai tujuannya. *Kedua*, model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. *Ketiga*, formulasi pembiayaan pendidikan. Formulasi model pembiayaan pendidikan masing-masing model ini tentunya berbeda satu sama lainnya, sebagai berikut; a) Model sumber pembiayaan (*The Resources Cost Model*) yang menerapkan suatu prototype pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah; b) Model surat bukti atau penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*) memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan; c) Model rencana bobot siswa (*Weight Student Plan*) merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya; d) Model berdasarkan pengalaman (*Historic Funding*) model ini sering disebut incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian; e) Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*) ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria;

e) Model berdasarkan kebijaksanaan (*Discretion Model*) ini memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya. *Keempat*, pengukuran pembiayaan pendidikan. Keterkaitan antara kinerja manajemen dengan kewajaran biaya

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

yang dibebankan kepada peserta didik, didasarkan pada suatu dugaan sementara, bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan kewajaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik.

Untuk memudahkan dalam melihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat pada gambar perumusan masalah di bawah ini :



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

2. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini berangkat dari analisis bahwa analisis standar pembiayaan penelitian meliputi konsep pembiayaan pendidikan yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, model pembiayaan pendidikan dengan dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan, formulasi pembiayaan pendidikan melalui model sumber pembiayaan model surat bukti atau penerimaan, model rencana bobot siswa, model berdasarkan pengalaman

model usulan, model berdasarkan kebijaksanaan dan pengukuran pembiayaan pendidikan melalui kinerja manajemen dengan kewajaran pembiayaan.

Peneliti membatasi sejumlah fokus masalah penelitian ini pada model yang terdiri dari: konsep Pembiayaan pendidikan, model pembiayaan pendidikan, formulasi pembiayaan pendidikan, dan pengukuran pembiayaan pendidikan.

3. Sistem Nilai dalam Kehidupan Manusia

Karakter individu, masyarakat dan negara dipengaruhi, ditumbuhkan, dan ditentukan oleh nilai yang melekat padanya. Karakter individu erat kaitannya dengan faktor internal yakni genetik atau bawaan dalam dirinya. Faktor bawaan ini kemudian dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, juga dipengaruhi peran dan posisi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan nilai atau *values education* merupakan tujuan dari pembentukan karakter. Ada beberapa hal penting berkenaan dengan sistem nilai kehidupan manusia, di antaranya: a. Nilai Teologis

Teologis artinya ketuhanan, nilai teologis berarti nilai ketuhanan. Nilai yang berkaitan dengan keyakinan sebagai pegangan hidup (*way of life*) seorang muslim. Nilai teologis yang diyakini sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, diibadahi dan ditaati dalam agama Islam adalah Allah Swt. Nilai teologis di dalamnya terkandung ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*habuminallah*). Sistem nilai teologis Islam mengenal rukun iman yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, serta

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

iman kepada qada dan qadhar. Juga rukun islam yang meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Sistem nilai teologis dalam islam berpedoman pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw.

b. Nilai Etik

Nilai etik merupakan nilai tingkah laku manusia yang dapat dijeaskan oleh akal. Nilai etik merujuk pada baik atau buruk tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sutarman, Haryono Edihermawan, Agus Salim, dalam jurnal *Kehidupan Manusia dengan Membudayakan Pendidikan dan Sistem Nilai Nilai Islami* menjelaskan Etik dan karakter merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Istilah etik memiliki arti yang semakna dengan akhlak, adab, moral, prilaku baik, dan sebagainya. Sementara karakter memiliki arti tabiat, watak, fitrah dan lain sebagainya. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Nilai etik merupakan pengetahuan dan kebiasaan seorang manusia yang bisa diperoleh melalui proses pendidikan dengan pendekatan *exemplary* atau modeling, melalui pembiasaan dan *uswah hasanah* atau pemberian contoh yang baik. Dalam ajaran islam ada tuntunan penanaman etik melalui himmah, contoh yang baik dan diskusi yang santun. *Bilhikmah wamauidtail hasanah wajadilhum bilati hiya ahsan*. Menyeru atau mengajak dengan teladan yang mulia, contoh yang baik, bila perlu berdiskusi atau deban dengan cara yang santun. Penanaman nilai dalam proses pendidikan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai upaya membangun karakter mulia.

c. Nilai Estetik

Asal kata estetika adalah *aesthesis* artinya sensitifitas atau perasaan. Secara umum estetika bisa diartikan keindahan atau kecantikan. Estetika erat kaitannya dengan kerapihan, ketertiban dan keserasian. Estetika merujuk pada tujuan untuk memperoleh ukuran yang dipandang sebagai keselarasan, keserasian dan keelokan. Dalam kaitannya dengan kehidupan manusia adalah bagaimana seseorang senantiasa membiasakan hidup secara rapi, disiplin dan tertib. Sebagaimana fitrahnya manusia menyukai kebaikan, kerapihan dan ketertiban, maka estetika merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Rasulullah Saw bersabda, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” (HR Ahmad).

d. Nilai Logis

Nilai logis merupakan rangkaian cara berpikir untuk mempelajari, mengingat dan memahami suatu objek dalam kehidupan sehari-hari. Logis secara umum bisa diartikan sebagai pemahaman yang masuk akal atau dapat dicerna oleh pikiran. Dengan berpikir logis manusia bisa menggali, menemukan, dan menciptakan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, nilai logis mengajarkan peserta didik untuk bisa berpikir secara sistematis, terukur, teratur dan rasional. Dengan berpikir logis seorang manusia bisa memikirkan keagungan dan kebesaran Allah Swt melalui alam semesta.

e. Nilai Fisik Fisiologis

Nilai fisik fisiologis merujuk pada keadaan fisik secara konkret. Manusia misalnya, memilikitubuh yang terdiri dari panca indera mulai kepala, badan,

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

tangan, dan kaki. Nilai fisik berkaitan dengan bentuk dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia memiliki tanggungjawab dan kewajiban menjaga dan memelihara fisiknya agar bugar, sehat, dan kuat. Fisik memiliki hak yang harus diperhatikan dengan baik. Dalam dunia pendidikan pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional yang wajib ada di sekolah baik dasar maupun menengah. Nilai fisik fisiologis erat kaitannya dengan pemeliharaan, penjagaan, penghargaan, dan penggunaan fisik yang baik sebagaimana fungsinya dan merupakan bentuk syukur pada Allah Swt.

f. Nilai Teleologik

Nilai teleologik merupakan nilai manfaat dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk hidup selayaknya bermanfaat bagi kehidupan individu dan sosial. Di sini juga berlaku efektifitas, efisien, dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serbagaimana pesan Rasulullah Saw bahwa manusia yang baik adalah manusia yang paling banyak membawa manfaat bagi orang lain. Maka nilai teleologik dalam kehidupan seorang muslim menjadi bagian yang harus diperhatikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan sejatinya guru mendorong peserta didik agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya juga lingkungannya.

4. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Atmaja dkk (2016) menyebutkan bahwa biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah

ditentukan. Fattah (2006: 112) mendefinisikan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan mencakup: gaji guru, peningkatan 12 profesional guru, sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mebeleur, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Depdiknas, 2005). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2005). Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan pendanaan pendidikan

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

erat kaitannya dengan keperluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan); 2) proses pembelajaran dan penilaian; 3) pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan saranaprasarana pendidikan; dan 4) manajemen. Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicari alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan

pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya (Depdiknas, 2005). Berdasarkan uraian klasifikasi biaya pendidikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas.

Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar (1991) bahwa hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Sulistyoningrum, 2010). Biaya

investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Sulistyoningrum, 2010).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu :

- a. biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*)
- b. dan biaya satuan per siswa (*unit cost*).

5. Model Biaya Pendidikan

Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan daripenerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanang Fattah, 2006:48). Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan. Perhitungan unit biaya masing-masing program yang dibiayai, ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dan usaha yang disepakati Negara bagian (Model Amerika Serikat).

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Kabupaten dan Kota).

Tipe pajak yang ditetapkan (*levy*) oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. (Mulyono, 2010:96) Lebih lanjut John dan Morphet (1975;325-353) menjelaskan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, dapat diklasifikasi dalam dua (2) model, yakni *flat grant model* (model dana bantuan murni) dan *power equalization model* (model persamaan kemampuan). Ornstein and Levine (2008;234) mendefinisikan *flat grant model* *this is the oldest and most unequal method of financing schools. State aid to local school districts is based on a fixed amount multiplied by the number of students in attendance. This fails to consider students with special needs (bilingual students cost more to educate than do native English speakers), special programs (vocational and special education), or the wealthy school districts.* Model ini memberikan kesan bahwa sistem distribusi anggaran (dana) pendidikan, untuk semua distrik (kabupaten/kota) akan menerima jumlah uang yang sama setiap murid pada masing-masing sekolah setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah yang memiliki sumber daya alamnya berlimpah (kaya) maupun yang tidak mendukung (miskin). Model ini mirip dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini. Sedangkan *equalization model* bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) dari

masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana yang lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Misalnya pertimbangan bagi daerah miskin akan menerima 5 permil ditambah dengan 7 permil dana dasar daerah.

6. Kategori Biaya Pendidikan

a. Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan unyuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri (Fattah, 2009: 23). *Indirect cost* (biaya tidak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya.

b. Biaya Masyarakat dan Biaya Pribadi

Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa.

7. Pengukuran Pembiayaan Pendidikan

Pembebanan biaya dan perhitungan biaya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, karena biaya merupakan faktor penting dalam memenangkan persaingan. Peserta didik akan memilih sekolah yang mampu menghasilkan layanan akademik yang memiliki mutu tinggi dengan harga yang termurah. Harga murah hanya dapat dihasilkan oleh sekolah yang secara terus menerus melakukan perbaikan terhadap aktivitas-penambah nilai (*value-added activities*), dan yang senantiasa berusaha menghilangkan aktivitas-bukan penambah nilai (*non-value-added activities*). Dengan demikian, *cost effectiveness* menjadi salah satu faktor untuk memenangkan persaingan jangka panjang.

Kemudian Identifikasi Sumber Dana, Sekolah harus mampu menghasilkan layanan akademik yang bermutu dengan harga yang rendah untuk dapat tetap bertahan di pasar. Sekolah berlomba untuk menghasilkan layanan akademik yang bermutu dengan harga yang rendah dengan berpedoman bahwa peserta didik hanya dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-penambah nilai (*value-added activities*). Dengan demikian dalam persaingan yang semakin tajam, manajemen memerlukan informasi biaya yang teliti, yang memperhitungkan secara cermat sumber dana (*resources*) yang dikorbankan untuk aktivitas penambah nilai bagi peserta didik. Sumber dana ini dapat berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga, dan dari masyarakat.

Selanjutnya Struktur Pentaripan. Dengan semakin mudahnya peserta didik memperoleh informasi mengenai mutu, harga, dan peringkat akreditasi, maka peserta didik hanya memilih sekolah yang mampu memberikan layanan akademik yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan harga yang terendah diantara harga berbagai yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah. Keadaan ini memaksa para penyelenggara pendidikan hanya membebani peserta didik dengan harga yang benar-benar wajar. Dalam situasi seperti ini, struktur pentaripan harus ditentukan berdasarkan biaya penuh layanan akademik yang dihitung secara cermat. Biaya yang Dibebankan kepada Peserta didik. Titik berat strategi untuk memenangkan persaingan yaitu pada usaha-usaha untuk menghilangkan *non-value added activities*. *Non-value added activities* merupakan aktivitas yang tidak seharusnya menjadi beban peserta didik, sehingga seharusnya dihilangkan dari proses/aktivitas. Dengan demikian, manajemen memerlukan informasi biaya penuh yang dikaitkan dengan berbagai aktivitas untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu layanan agar sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh peserta didik sebagai pemakai layanan.

Mutu Penyelenggaraan. Agar peserta didik terjamin hanya akan dibebani dengan biaya yang wajar, maka penyelenggara pendidikan harus senantiasa melakukan penyempurnaan aktivitas secara berkesinambungan (*continual improvement*) yang digunakan untuk menghasilkan layanan pendidikan. Pengumpulan informasi biaya penuh masa lalu ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam menghilangkan berbagai pemborosan yang terjadi dalam aktivitas untuk menghasilkan layanan pendidikan. Ukuran mutu yang digunakan

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

ditetapkan berdasarkan empat perspektif, yaitu kualitas dan kapabilitas personal, kualitas proses penyelenggaraan, layanan kepada mahasiswa, dan kinerja keuangan.

8. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Konsep biaya bisa dirujuk dari beberapa pakar, diantaranya Mulyono (2010;81) menyatakan biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. Di samping itu Mulyadi (2014) mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni 1) pengorbanan sumber ekonomi, 2) diukur dalam satuan uang, 3) yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, 4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Kata biaya dalam pendidikan jika diimplementasikan merupakan sebuah proses sehingga disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata asli biaya ditambah awalan pe dan akhiran an (Depdikbud 1995).

Memaknai tentang biaya pendidikan, dalam alam pikiran manusia tentunya akan mengarah pada sejumlah barang dan jasa yang diperlukan dalam proses pendidikan itu sendiri. Al Kadri (2011;1) menjelaskan biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan itu juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan

yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah, (*public cost*) dan masyarakat dan orang tua peserta didik (*private cost*). *Public cost* adalah biaya pendidikan dari pemerintah, yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya (hibah) baik dalam dan luar negeri, sedangkan *private cost* adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada individu peserta didik dan masyarakat (seperti: biaya sekolah, pembelian buku dan peralatan sekolah lainnya).

Bagi seseorang analis keuangan, biaya pendidikan maknanya barangkali tidak seluas kajian keuangan makro. Dalam pikiran banyak pihak biaya pendidikan mungkin kecil hanya mempertemukan antara *system's input, objectives, outputs, dan benefits*. Padahal dalam kepentingan memajukan bangsa, mencerdaskan masyarakat, maka analisis biaya pendidikan menjadi alat untuk memperbaiki kinerja dan perencanaan sistem pendidikan dimasa datang.

Untuk memahami konsep biaya pendidikan secara utuh dan mendalam ada beberapa pemahaman yang bisa dielaborasi, antara lain *opportunity cost or sacrifice cost, money cost versus financial cost, factor cost, current cost versus capital cost, total expenditures, current versus constant prices, public versus private cost, dan unit cost* (Buchanan, J.M., 1979).

Opportunity cost or sacrifice cost bisa dipahami sebagai biaya kesempatan atau peluang yang hilang selama mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal diukur dari nilai uang yang hilang karena kesempatan/peluang yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya seorang mahasiswa yang sudah berusia produktif bisa bekerja sebagai karyawan,

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

staf namun kesempatan itu tidak bisa diambilnya karena focus untuk menyelesaikan pendidikan. Biaya pendidikan selanjutnya dikenal dengan istilah *resource cost versus money costs*. Dimana *resource cost* itu merupakan adalah biaya pendidikan yang diukur dalam bentuk unit fisik, seperti: jam guru mengajar, jumlah buku yang dipergunakan, luas lantai yang dibangun, dan lain-lainnya. Sedangkan *money cost* atau *financial cost* merupakan biaya yang harus dibayar untuk setiap siswa melalui sistem pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan lainnya disebut juga *factors cost* yang dibayar oleh sistem pendidikan untuk beberapa faktor produksi sebagai *resource inputs*, seperti: gaji guru, pembelian perlengkapan, pengadaan peralatan, pembangunan gedung.

Dalam hal layanan pendidikan, kita bisa mengategorikan biaya pendidikan dalam bentuk *current cost versus capital costs*. Kedua biaya pendidikan itu, didasarkan atas lamanya pemberian layanan pendidikan terhadap *resource input* (peserta didik), dimana *current cost* berhubungan dengan pengeluaran yg dikeluarkan dalam memberikan pelayanan terhadap *resource input* dan perlengkapan yang digunakan dalam satu tahun fiskal, serta ada pembaharuan secara reguler.

Begitu juga *capital cost* berhubungan dengan pengeluaran yang terdiri dari berbagai item-item yang menyumbangkan kegunaan pelayanan pendidikan yang berlangsung lebih dari satu tahun fiskal, contoh: biaya pembangunan gedung, renovasi ruang kelas. *Capital cost* harus diamortisasi sesuai umurnya dan dibebankan pada periode pelayanan (Ferdinand, W.P., 2013).

Setelah kita mengetahui biaya pendidikan, besarnya, komponen yang bertanggung jawab dalam membayarnya tentu kita mesti mengenali pembiayaan pendidikan dalam konteks mengetahui sumber pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk digunakan memformulasikan dan mengoperasionalkan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren).

Pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara maupun daerah seperti kondisi geografis, tingkat kemahalan, kondisi politik, hukum, kekuatan ekonomi, program pembiayaan pemerintah dan sistem administrasi di masing-masing lembaga pendidikan itu sendiri.

Untuk mengetahui apakah pembiayaan yang sudah tersedia sudah memuaskan. Hal ini dilihat dari perspektif: a) proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; b) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah mensubsidi layanan pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya, c) dukungan orang tua siswa dan masyarakat sebagai komponen yang strategis dalam membiayai pendidikan.

Keputusan dalam pembiayaan lembaga pendidikan akan memengaruhi bagaimana sumber daya yang diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dikaji siapa yang akan dididik dan seberapa banyak peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan itu.

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Demikian pula pembiayaan pendidikan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah, agar mampu memberikan kontribusi secara signifikan mendukung pembiayaan lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pembiayaan pendidikan perlu juga dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan anaknya vs social benefit secara luas yang akan didapatkan, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

J. Wiseman (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S.M. (2013) menjelaskan ada tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan 1) kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital; 2) pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan; 3) pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Lebih khusus Levin (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S. M. (2013) melihat pembiayaan pada level sekolah merupakan proses dimana stakeholders sekolah mengetahui besaran pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan program pembiayaan Negara untuk sector pendidikan.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam mengetahui pembiayaan sekolah, yakni *school revenues*, *school expenditures*, *capital dan current cost*. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Setiap kebijakan dalam pembiayaan akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan.

Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni: 1) sasaran pendidikan, tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, 2) proses pendidikan, tentang bagaimana mereka dididik, 3) penanggung jawab berkaitan dengan siapa yang akan membayar biaya pendidikan, 4) keputusan tentang sistem pembiayaan pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan di lembaga pendidikan.

Untuk menganalisis pernyataan di atas, ada dua hal pokok yang harus dipertegas, yakni: i) bagaimana sumber daya pendidikan akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisisnya, yakni, i) efisiensi terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pelaku pendidikan dan ii) keadilan yang terkait dengan *benefits dan cost* yang seimbang.

Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) Triwiyanto, T. (2011) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

jenis ini ditanggung oleh korporasi yang menyediakan CSR (corporate social responsibility), baik untuk para pekerjanya, maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Apalagi sekarang ini peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan kejuruan sebagai bentuk komitmen menciptakan link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.

9. Model Pembiayaan Pendidikan

Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisipenghasilan (Armida, 2011:145). Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan daripenerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanang Fattah, 2006:48). Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan. Perhitungan unit biaya masing-masing program yang dibiayai, ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dan usaha yang disepakati Negara bagian (Model Amerika Serikat). Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal(Kabupaten dan Kota).

Tipe pajak yang ditetapkan (levy) oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. (Mulyono, 2010:96) Lebih lanjut John dan Morphet (1975;325-353) menjelaskan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, dapat diklasifikasi dalam dua (2) model, yakni flat grant model (model dana bantuan murni) dan power equalization model (model persamaan kemampuan). Ornstein and Levine (2008;234) mendefinisikan *flat grant model this is the oldest and most unequal method of financing schools. State aid to local school districts is based on a fixed amount multiplied by the number of students in attendance. This fails to consider students with special needs (bilingual students cost more to educate than do native English speakers), special programs (vocational and special education), or the wealthy school districts.* Model ini memberikan kesan bahwa sistem distribusi anggaran (dana) pendidikan, untuk semua distrik (kabupaten/kota) akan menerima jumlah uang yang sama setiap murid pada masing-masing sekolah setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah yang memiliki sumber daya alamnya berlimpah (kaya) maupun yang tidak mendukung (miskin). Model ini mirip dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini. Sedangkan equalization model bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) dari masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana yang lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Misalnya pertimbangan bagi daerah miskin akan menerima 5 permil ditambah dengan 7 permil dana dasar daerah.

Model ini juga menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang miskin. Pengalokasian biaya pendidikan menurut Thomas H. Jones (1985;100- 131), mengklasifikasikan model pembiayaan pendidikan, seperti yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat saat ini, terdiri dari 6 model, antara lain flat grant, complete state funding, the foundation plan, guaranteed tax base plan, power equalizing, sebagai berikut:

- a. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) merupakan tipe bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua. Dimana model ini mendistribusikan dana pendidikan pada Negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari pajak lokal atau pembagian any daerah, jumlah bantuan sama rata untuk semua siswa. Sehingga setiap sekolah mendapatkan bantuan sejumlah dana yang sama, dihitung persiswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, Model ini memberikan kesan bantuan pendidikan dengan sistem ini membagi rata, sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mendapatkan pembiayaan (uang) lebih besar.

- b. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Complete State Funding Model*), dimana pendanaan pendidikan ditanggung Negara Sepenuhnya (*full state funding*). Model ini merancang pembiayaan pendidikan yang berusaha mengeliminir perbedaan pemerintah federal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Model ini berusaha menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya.
- c. Model Landasan Perencanaan (*The Foundation Plan Model*) ini ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan untuk setiap distrik sekolah lokal di Negara-negara bagian (federal). The foundation plan Model bantuan pembiayaan pendidikan ini dari Negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak masing-masing daerah. Negara dapat memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuan model ini adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah pada daerah-daerah yang miskin. Perilaku lain yang muncul dari penggunaan model adalah memberikan peluang munculnya berbadai daerah dengan kategori miskin. Di Indonesia dikenal dengan label daerah tertinggal.
- d. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*) model ini merupakan matching plan, dimana persentase tertentu dari total

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera.

- e. Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing Model*), ini dikembangkan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1920-an. Model ini merupakan kelanjutan dari bentuk *Guaranteed Tax Base*, dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan *match* berada pada suatu rasio variabel dana yang diperlukan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.
- f. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*), model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian. Selanjutnya Negara menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan bantuan kesekolah pada distrik yang lebih miskin. Di samping itu, beberapa Negara di dunia juga menerapkan model pembiayaan pendidikan yang berbeda, antara lain *the resources cost model, models of choice and voucher plans, weight student plan, historic funding, bidding model, discretion model* (Thamrin Abdullah, 2012:79-90).

10. Formulasi Model Pembiayaan Pendidikan

Formulasi model pembiayaan pendidikan masing-masing model ini tentunya berbeda satu sama lainnya, sebagai berikut.

- a. Model Sumber Pembiayaan (*The Resources Cost Model*) yang dikembangkan oleh Hambers dan Parish menerapkan suatu prototype pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergiovanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.
- b. Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*) memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid dan orang tua peserta didik. Indonesia tahun 2004 pernah memberlakukan cara pembiayaan berupa voucher ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi pada akhirnya menimbulkan persoalan karena seringkali pejabat yang membantu memperjuangkan anggaran tersebut mengingkarkan diberikan komisi atas usahanya.
- c. Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*) merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat (disabilitas), siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa (akselerasi).
- d. Model Berdasarkan Pengalaman (*Historic Funding*) model ini sering disebut incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian.
- e. Model Berdasarkan Usulan (*Bidding Model*) ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria.
- f. Model Berdasarkan Kebijakan (*Discretion Model*) ini memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.

Model pembiayaan pendidikan yang telah dijelaskan di atas memberi gambaran ada keunggulan dan kelemahan pada masing-masing model. Sistem

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

pembiayaan pendidikan di Indonesia sulit merujuk kepada salah satu model pembiayaan seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua serta masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan persoalan pendanaan pembiayaan pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar setelah melihat ada berbagai model pembiayaan, misalnya tanggung jawab dan sumber biaya pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

11. Pengukuran Pembiayaan Pendidikan

Keterkaitan antara kinerja manajemen dengan kewajaran biaya yang dibebankan kepada peserta didik, didasarkan pada suatu dugaan sementara, bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan kewajaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik.

- a. Pembebanan biaya dan perhitungan biaya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, karena biaya merupakan faktor penting dalam memenangkan persaingan. Peserta didik akan memilih sekolah yang mampu menghasilkan layanan akademik yang memiliki mutu tinggi dengan harga yang termurah. Harga murah hanya dapat dihasilkan oleh sekolah yang secara terus menerus melakukan perbaikan terhadap aktivitas-penambah nilai (*value-added activities*), dan yang senantiasa berusaha menghilangkan aktivitas-bukan penambah nilai (*non-value-added activities*). Dengan demikian, *cost effectiveness* menjadi salah satu faktor untuk memenangkan persaingan jangka panjang.

- b. Kemudian Identifikasi Sumber Dana, Sekolah harus mampu menghasilkan layanan akademik yang bermutu dengan harga yang rendah untuk dapat tetap bertahan di pasar. Sekolah berlomba untuk menghasilkan layanan akademik yang bermutu dengan harga yang rendah dengan berpedoman bahwa peserta didik hanya dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-penambah nilai (*value-added activities*). Dengan demikian dalam persaingan yang semakin tajam, manajemen memerlukan informasi biaya yang teliti, yang memperhitungkan secara cermat sumber dana (*resources*) yang dikorbankan untuk aktivitas penambah nilai bagi peserta didik. Sumber dana ini dapat berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga, dan dari masyarakat.
- c. Selanjutnya Struktur Pentaripan. Dengan semakin mudahnya peserta didik memperoleh informasi mengenai mutu, harga, dan peringkat akreditasi, maka peserta didik hanya memilih sekolah yang mampu memberikan layanan akademik yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan harga yang terendah diantara harga berbagai yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah. Keadaan ini memaksa para penyelenggara pendidikan hanya membebani peserta didik dengan harga yang benar-benar wajar. Dalam situasi seperti ini, struktur pentaripan harus ditentukan berdasarkan biaya penuh layanan akademik yang dihitung secara cermat. Biaya yang Dibebankan kepada Peserta didik. Titik berat strategi untuk memenangkan persaingan yaitu pada usaha-usaha untuk menghilangkan *non-value added activities*. *Non-value added activities* merupakan aktivitas yang tidak seharusnya menjadi beban

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

peserta didik, sehingga seharusnya dihilangkan dari proses/aktivitas. Dengan demikian, manajemen memerlukan informasi biaya penuh yang dikaitkan dengan berbagai aktivitas untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu layanan agar sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh peserta didik sebagai pemakai layanan.

- d. Mutu Penyelenggaraan. Agar peserta didik terjamin hanya akan dibebani dengan biaya yang wajar, maka penyelenggara pendidikan harus senantiasa melakukan penyempurnaan aktivitas secara berkesinambungan (*continual improvement*) yang digunakan untuk menghasilkan layanan pendidikan. Pengumpulan informasi biaya penuh masa lalu ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam menghilangkan berbagai pemborosan yang terjadi dalam aktivitas untuk menghasilkan layanan pendidikan. Ukuran mutu yang digunakan ditetapkan berdasarkan empat perspektif, yaitu kualitas dan kapabilitas personal, kualitas proses penyelenggaraan, layanan kepada mahasiswa, dan kinerja keuangan.
- e. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (Lailiana, 2013).
 - 1) Rasio Ekonomi. Rasio ini menggambarkan kehematan dalam penggunaan anggaran dan kecermatan dalam pengelolaan serta menghindari pemborosan. Kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (Darmiyati & Purwanto, 2013; Pramadhany, 2011; Iswari, 2011).

Total Belanja dibagi Anggaran yang ditetapkan 100%

Tabel 1
 Kriteria Rasio Ekonomi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100%	Tidak Ekonomis

2) Rasio Efisiensi. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan (Pramadhany, 2011; Anonim, 1996).

Rasio Efisiensi =

Total Belanja dibagi Total Realisasi Pendapatan 100%

Tabel 2
 Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100%	Tidak Ekonomis

3) Rasio Efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Lailiana, 2013). Rasio Efektivitas =

Total Realisasi Pendapatan Target Pendapatan 100%

Tabel 3.
 Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 60%	Sangat Efektif
100% keatas	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

C. Kesimpulan

Dengan memerhatikan uraian analisis pembiayaan pendidikan yang dibahas dalam makalah ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: *Pertama*, konsep Pembiayaan pendidikan, yaitu suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. *Kedua*, model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. *Ketiga*, formulasi pembiayaan pendidikan berbeda satu sama lainnya; a) model sumber pembiayaan yang menerapkan suatu prototype pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah; b) model surat bukti atau penerimaan memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan; c) model rencana bobot siswa merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya; d) model berdasarkan pengalaman model ini sering disebut *incrementalism*, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian; e) model usulan dengan mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria; e) model kebijaksanaan dengan memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya. *Keempat*, pengukuran pembiayaan

pendidikan melalui kewajaran dan kebijakan. Demikian kesimpulan dari pembahasan analisis pembiayaan pendidikan yang disajikan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, RM dkk. 2016. Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No. 1, Februari 2016 - 1 28
- Coombs, Philip H., 1967, What is Educational Planning, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, Paris
- Chun Wei & Nick Bontis. (2002). The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. New York: Oxford University Press
- Dikti.(2003).“Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Indonesia”. Bandung:
- Engkoswara, 1987, Dasar-dasar Administrasi Pendidikan, Proyek Pengembangan LPTK, Jakarta
- Fattah Nanang, DR,(2006). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2009). Landasan Manajemen Pendidikan.Bandung: Remaja Rosdakarya
- Johns, L.R & L.F Morphet, The Economics Financing and Education: A System Approach , (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1975)
- Hunger,J.D. and Wheelen, T.L.(1996). Strategic Management.Addison-Wislgeyg' Publishing Company, Inc. Diterjemahkan oleh AJ. (2001), Yogyakarta:
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton. (1996). "Translating Strategy Into Action: The Balanced Scorecard:", Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton .(2000). "Menerapkan Strategi Menjadi Aksi"Balanced Scorecard",Erlangga, Jakarta
- Kompri.2016. Manajemen Pendidikan Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Kurniadi,D. dan Machali, I . 2016. Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan .Jogakarta : Ar-Ruzz Media.
- Saat, S,. 2015. Faktor – Faktor Determinan Dalam Pendidikan. Jurnal Al-Ta'dib Vol. 8 No. 2, Juli – Desember 2015.

Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan

Sumantri, M. dan Yatimah, D . 2017. Pengantar Pendidikan. Banten: Universitas Terbuka.

Sulistiyoningrum, Nining. 2010. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Dari <http://niningsulistiyoningrum>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
AmandemenZyuhendi, Andi. 2013. *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*.
Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2020 dari
<http://andimpi.blogspot.nl/2020/10/pembiayaan-pendidikan-di-indonesia.html>

UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas